

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori dan Konsep



Gambar 2.1 Teori dan Konsep yang Digunakan Peneliti dalam Tesis

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menjabarkan teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dimana didukung oleh penelitian terdahulu sebagai pembanding dan menjaga orisinalitas penyusunan penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep meliputi salah satu teori Hubungan Internasional yaitu teori Regionalisme yang digunakan dalam melihat bagaimana identitas dan tujuan dari IORA sebagai organisasi regional kawasan Samudera Hindia; konsep Geopolitik Maritim yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat

bagaimana negara-negara anggota IORA dapat memaknai kawasan Samudera Hindia untuk mencapai keuntungan kawasan; konsep Keamanan Maritim untuk mengidentifikasi ancaman maritim yang terjadi di Samudera Hindia; teori *Ocean Governance* untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah IORA dalam mengelola Samudera Hindia termasuk untuk melihat bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh beberapa negara dapat dilakukan secara kerjasama dalam kerangka multilateralisme; dan teori Peran untuk mengidentifikasi peran IORA dalam menemukan apa harapan organisasi dan hubungannya dengan analisa perilaku untuk mencapai tujuan kawasan.

2.1.1.1 Teori Hubungan Internasional (Regionalisme)

Regionalisme merupakan salah satu dari banyak teori Hubungan Internasional. Regionalisme adalah ekspresi atas identitas dan tujuan umum yang dihasilkan dari implementasi sebuah institusi yang mengekspresikan identitas tertentu dan membentuk tindakan kolektif dalam sebuah wilayah geografis.

Joseph Nye (1968) mengartikan kawasan sebagai kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan oleh hubungan geografis dan memiliki tingkat saling ketergantungan satu sama lain; dan regionalisme sebagai pembentukan kelompok (asosiasi) antar negara berdasarkan wilayah. Inisiatif regional pertama tercatat pada 1950an dan 1960an serta dengan suksesnya Komunitas Eropa (*European Community*) hingga keberhasilan Uni Eropa sebagai contoh nyata dari terciptanya regionalisme.

Regionalisme dipandang sebagai praktek dalam koordinasi dan hubungan sosial, ekonomi, dan inisiatif politik dalam sebuah kawasan regional yang terdiri dari beberapa negara. Dalam tingkat institusi (organisasi) regionalisme berperan dalam pertumbuhan norma, atura, hingga struktur formal yang dapat menciptakan koordinasi dalam lingkup wilayah (Heywood, 2011).

Katzenstein (2006) mengatakan bahwa regionalisme juga diartikan sebagai praktek kelembagaan dan regionalisasi yang melibatkan negara sebagai aktornya. Fawcett (2004) mengartikan regionalisme sebagai kebijakan yang diteruskan dalam regionalisasi sebagai proses dalam sebuah pencapaian tujuan regional.

Sebagian besar dari regionalisme berujung pada implikasi terciptanya kesejahteraan dan tujuan ekonomi kelompok lainnya. Maka regionalisme erat kaitannya dengan integrasi ekonomi sebagai tujuan utama, namun dalam perkembangannya isu keamanan juga dianggap penting sebagai pendukung tercapainya stabilitas kawasan dalam mencapai kesejahteraan.

2.1.1.2 Konsep Geopolitik Maritim

Pemikir geopolitik maritim pertama Alfred Thayer Mahan menyebutkan bahwa untuk menguasai dunia maka harus menguasai perdagangan dunia, dimana perdagangan dunia selalu melalui laut, maka dengan menguasai laut akan pula menguasai perdagangan dunia; dengan kata lain siapa yang mau mengontrol dunia maka harus mampu mengontrol laut (Mahan, 1879).

Dalam konteks geopolitik maritim, maka lingkungan fisik yang dimaksud mencakup sebagian besar dari wilayah laut dimana peran dari angkatan laut dalam melakukan gelar kekuatan sangat diperhitungkan untuk mencapai tujuan dari negara. Dalam memaknai geopolitik maka tidak lepas dari pentingnya pemahaman terhadap geografi. Geopolitik menekankan pada hubungan antara politik dan lingkungan fisik (geografi); bagaimana lingkungan tersebut memberikan pemahaman tentang hubungan politik dan hubungan antar negara. Geopolitik menekankan implikasi dari kekuatan negara dalam lingkungan tertentu, dimana tidak jarang terjadinya benturan antar kepentingan dari negara atas sebuah lingkungan fisik tersebut.

Halford Mackinder (1890) mengklaim bahwa karakter dan tradisi sebuah lingkup masyarakat akan dipengaruhi oleh ekonomi dan peluang geografis dimana selanjutnya akan melahirkan geostrategi dari aktor-aktor tersebut. Bantarto Bandoro (2012) mengemukakan bahwa geostrategi akan melibatkan penentuan geografis operasi militer perencanaan tata kelola dan penerahan kekuatan militer terhadap lingkungan tersebut. Geopolitik atau geografi politik yang berhubungan dengan geografi dapat mempengaruhi tujuan kebijakan dari negara, konteks fisik hubungan antar negara, dan sebagai area orkestra militer dalam prasarana penerapan strategi militer negara baik dalam masa damai maupun perang.

Geografi adalah lingkungan fisik; dan bila memiliki nilai signifikan dan daya tarik politik yang mengarahkan pihak yang berkepentingan ke dalam kompetisi dan/atau kerjasama untuk mengendalikan lingkungan itu, istilah geografi berubah menjadi geopolitik. Geopolitik juga dipandang sebagai nilai dari wilayah geografis tersebut, betapa pentingnya lokasinya terhadap negara. Dengan kajian geopolitik, kita bisa melihat bagaimana wilayah geografi dapat dilihat sangat strategis untuk sebuah negara (atau beberapa) negara. Tempat atau lokasi dapat dianggap strategis jika bisa memberikan nilai signifikansi terhadap sekitarnya.

Nilai itu bisa jadi sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional negara, nilai itu sendiri secara otomatis akan menarik dan mengikat negara agar tetap menjaga agar tetap ada kontrol terhadap lokasi strategis. Jika lingkungan strategis memiliki nilai dan daya tarik yang signifikan bagi pihak yang berkepentingan, maka strategi pihak yang berkepentingan untuk memiliki kontrol terhadap lingkungan strategis tersebut disebut sebagai konsep geostrategi.

2.1.1.3 Konsep Keamanan Maritim

Dr. Makmur Keliat (2009) menurunkan analisis Buzan (1998) dalam kajian studi keamanan untuk mendefinisikan konsep keamanan maritim. Isu keamanan maritim bersifat transnasional dimana perlu kerjasama dari negara-negara pantai dalam penanggannya. Hal ini termasuk isu ancaman-ancaman keamanan yang muncul dari migrasi, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, keamanan pangan, keamanan kesehatan, bahkan *human security*.

Dilihat dari konteks internasional, belum ada definisi yang solid mengenai apa itu keamanan maritim. Ia memandang keamanan maritim secara konseptual menitikberatkan pada keamanan non-tradisional, dan sangat dipengaruhi oleh mahzab (keamanan) non-tradisional (Octavian, 2014). Dalam tingkatan regional, ASEAN misalnya, ancaman terhadap keamanan maritim diartikan dalam lima kejadian, yaitu pembajakan, perampokan bersenjata, lingkungan kelautan, penangkapan ikan yang ilegal, serta penyelundupan barang, manusia, senjata, dan narkoba.

Dalam tulisannya pula menyebutkan apa yang tertulis dalam dokumen *The Present Addendum to the Report of the Secretary General on Oceans and the Law of the Sea (A/63/63)* bahwa keamanan maritim memiliki kaitan terhadap penanganan tiga isu ancaman, yaitu:

1. Tindakan teroris terhadap pelayaran kapal dan instalasi lepas pantai;
2. Pembajakan dan perampokan bersenjata;
3. Lalu lintas obat terlarang dan narkotik yang ilegal.

Budiman Djoko Said (2008) mendefinisikan Keamanan Maritim sebagai kondisi bebas dari ancaman dalam domain maritim. Keamanan maritim juga dapat diartikan sebagai upaya dalam menjaga kepentingan nasional sebuah negara yang berfokus pada kepentingan di, dan atau melalui laut. Produk pengamanan maritim akan didapat dengan upaya yang disebut Strategi Nasional untuk Keamanan maritim (*National*

Strategy for Maritime Security) yang didukung selanjutnya dengan turunan konsep Keamanan maritim yaitu *Maritime Domain Awareness* atau MDA.

Ruang lingkup pengawasan maritim sangat luas, selain mencakup keamanan dalam pengertian tradisional, maritim juga berpengaruh dalam hal lain seperti ekonomi perdagangan. Dengan luasnya strategik substansi yang harus diamankan, akibatnya tingkat keamanan nasional yang dapat dicapai harus menjadi prioritas dan menjadikan pengamanan maritim sebagai hal utama yang harus dilakukan. Banyaknya aktivitas yang terjadi di wilayah maritim juga membuat pengamanan terhadap wilayah tersebut harus semakin diperhatikan, dan untuk menyukseskan tujuan tersebut maka pemerintah mengidentifikasi dan memonitor kegiatan di kawasan maritim dengan pendekatan *maritime domain awareness*.

Chris Rahman (2009) melihat konsep Keamanan maritim berangkat dari konsep keamanan (*security*). Konsep 'keamanan' memperhatikan datangnya ancaman yang tidak hanya datang dari dalam sebuah kawasan namun juga bisa jadi datang dari luar atau disebut faktor eksternal. Berangkat dari konsep keamanan yang dikemukakan Buzan, keamanan maritim dapat dilihat bagaimana keamanan tersebut diimplikasikan di sebuah kawasan yang dipersempit lingkungannya yaitu kawasan maritim, dengan kata lain konsep dari keamanan itu dapat digunakan langsung dalam kawasan ruang lingkup maritim. Ia mengemukakan lima perspektif keamanan maritim, yaitu *security of the sea itself* (keamanan dari laut itu sendiri), *ocean governance* (pemerintahan di samudera), *maritime border protection* (proteksi keamanan batas wilayah maritim), *military activities at sea* (aktivitas militer di laut), serta *security regulation of the maritime transportation system* (regulasi keamanan terhadap sistem transportasi maritim).

Keamanan Maritim erat hubungan dengan Kekuatan Maritim (*Seapower*) karena keamanan maritim dapat dicapai dengan keberhasilan gelar kekuatan maritim. Menurut Laksamana (Purn) Marsetio (2014),

Seapower adalah kemampuan suatu negara untuk menggunakan dan mengendalikan laut (*sea control*) dan mencegah lawan untuk menggunakannya atau yang sering disebut sebagai *sea denial*. *Sea power* suatu negara dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengolah dan menguasai keahlian di bidang-bidang maritim.

Alfred Thayer Mahan seorang pemikir di bidang maritim dalam bukunya *The Influence of Sea Power upon History 1660-1783* mengemukakan bahwa diperlukan enam elemen utama yang dibutuhkan sebuah negara untuk mempunyai kekuatan laut (*sea power*) yang kuat, yaitu letak geografi, bangun muka bumi, luas dan panjang wilayah, karakter penduduk, jumlah penduduk, dan karakter pemerintah (Mahan, 1890). Kekuatan laut atau *sea power* merupakan faktor penting untuk menciptakan sebuah kondisi yang aman di laut. Menurut Geoffrey Till (2009) *sea power* dapat didefinisikan sebagai kekuatan atau kapasitas untuk mempengaruhi negara maupun non-negara dengan apa yang dilakukan di laut. *Sea power* juga meliputi aspek non militer yang ada di laut, selama aspek tersebut dapat membantu tugas angkatan laut.

2.1.1.4 Teori Ocean Governance

Gupta (2010) menjelaskan bahwa laut atau *ocean* merupakan *the last frontier* atau perbatasan terakhir di bumi yang kondisinya akan mempengaruhi geopolitik dunia, globalisasi, dan keseimbangan sosio-ekonomi. Pada abad 21, laut memiliki peran signifikan bagi keberlangsungan struktur internasional. Perubahan yang terjadi dalam pandangan terhadap laut dan juga fungsinya membuat perubahan pola pikir dalam menggunakan dan mengatur laut.

Hugo Gratia memandang laut sebagai wilayah yang terbuka dan milik siapa saja. Seiring berjalannya waktu, dunia internasional memandang perlu untuk adanya hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban pengguna laut guna menghindari adanya konflik kedepannya. Kemudian diketahui hingga saat ini bahwa Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea* atau UNCLOS) yang dilahirkan tahun 1982 sebagai hukum paten yang mengatur laut hingga saat ini.

Bab 17 dalam Agenda 21⁶ mengidentifikasi *ocean governance* sebagai pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan terpadu dan menjadikan *ocean governance* sebagai salah satu komponen penting sebagai sistem pendukung kehidupan global. Tujuan dari diaturnya *ocean governance* adalah sebagai (Gupta, 2010:28):

1. *Spatial integration* untuk mempertimbangkan tantangan ruang laut secara menyeluruh;
2. *Temporal integration* atau kohersi antara visi jangka panjang, menengah, dan pendek;
3. *Stakeholder integration* untuk mempromosikan kolaborasi antar negara di tingkat nasional, regional, dan global untuk menciptakan pendekatan kooperatif atas permasalahan yang terjadi di kawasan;
4. *Sectoral integration* untuk pengembangan hubungan horizontal antar sektor sehingga ada pendekatan terkoordinasi terhadap pembangunan ekonomi; dan
5. *Institutional integration* sebagai integrasi antar kelembagaan untuk menciptakan kesinambungan dalam perumusan kebijakan, upaya pengembangan dan tata kelola baik di level nasional, regional, maupun global.

Dalam menjalankan *ocean governance* dapat diwujudkan dengan *ocean governance initiatives* (Gupta, 2010:32) berupa merumuskan aksi jangka panjang yang dibentuk secara regional, melaksanakan manajemen adaptif, pendekatan dengan integrasi dan organisasi, mempromosikan partisipasi dan budaya kolaborasi, menciptakan forum bagi negara-negara

⁶ Agenda 21 adalah sebuah *action-plan* yang peihal pembangunan berkelanjutan keluaran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agenda 21 adalah hasil dari Earth Summit yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992. Istilah “21” pada “Agenda 21” menggambarkan abad ke-21.

pantai, mengembangkan pemahaman multidisiplin tentang pengetahuan laut, melakukan *strategic impact assessment (SIA)*, hingga menyediakan pusat kajian informasi dan teknologi kawasan.

Dalam menjaga keamanan maritim, terutama keamanan maritim kawasan, maka akan terkait dengan terbentuknya multilateralisme. Multilateralisme menitikberatkan terjadinya kerjasama sebagai suatu media oleh negara-negara dalam menyesuaikan kebijakannya dengan mempertimbangkan preferensi dari negara lain. Multilateralisme merupakan ideologi yang dirancang untuk menyuguhkan kegiatan kerjasama dengan melibatkan negara-negara baik secara universal atau dalam beberapa grup yang relevan (Caporaso, 1992).

Negara masuk kedalam sebuah hubungan kontraktual dengan negara lain, maka negara tersebut telah memiliki pertimbangan secara rasional dan sesuai dengan kepentingannya. Hal-hal yang diidentifikasi termasuk dalam pendekatan ini adalah negara dan kepentingan, kemampuan dan strategi untuk bagaimana berinteraksi dengan negara lain (Caporaso, 1992).

2.1.1.5 Teori Peran

Pemahaman terhadap Teori Peran atau *Role Theory* merupakan bagian dari ilmu Sosiologi untuk mengetahui posisi dari pelaku dalam masyarakat (Cohen dan Orbuch, 1989). Menurut Biddle (1986) Teori Peran dapat dilihat dalam kehidupan sosial sebagai pola perilaku dari seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Terdapat lima sudut pandang dalam melihat posisi 'peran' di masyarakat, yaitu pendekatan fungsional, *symbolic interactionist*, struktural, oganisasional, dan peran kognitif.

Peran dimaksudkan sebagai harapan bersama dan normatif yang menentukan perilaku dari aktor. Pendekatan fungsional dalam taori peran menggambarkan sebuah wajah dari sistem sosial yang stabil dan sebagai

sarana dalam menjelaskan bagaimana sistem sosial tersebut mencapai kondisi stabil (Biddle, 1986).

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa “peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Adapun faktor-faktor penyesuaian peran yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan, yaitu kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran; konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan; kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang diemban; keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran; pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran; dan proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan melindungi diri dari rasa bersalah.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu berperan penting dalam penelitian selanjutnya sebagai pembanding dan menjaga orisinalitas penyusunan penelitian. Penulis menggunakan hasil dari penelitian terdahulu baik dalam kerangka metologi, teori, pembahasan analisa, hingga temuannya sebagai bahan yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini diambil lima makalah sebagai penelitian terdahulu yang dari masing-masing makalah dan penelitian ini memiliki benang merah kesamaan dalam pembahasan keamanan maritim dan kawasan Samudera Hindia. Perbedaan masing-masing makalah dan penelitian ini juga dapat mendukung orisinalitas dan keterbaharuan dari temuan yang nantinya didapat dari hasil penelitian. Kelima penelitian terdahulu tersebut adalah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Jurnal / Buku	Sumber	Metodologi	Objektif Riset	Hasil dan Relevansi
1.	Indian Ocean Region: Maritime Regimes for Regional Cooperation – Springer, 2010	Manoj Gupta	Kualitatif	1) Menganalisa tentang pentingnya peran aktor dan struktur untuk mengembangkan hubungan antar negara yang berkepentingan di kawasan Samudera Hindia berlandaskan rezim maritim 2) Memberikan pemahaman tentang rezim maritim di kawasan Samudera Hindia dengan	1) Walaupun Samudera Hindia merupakan wilayah geopolitik yang penting bagi dunia, namun struktur kepemimpinan regional (kawasan) dan tata kelola laut dalam rezim maritim belum berjalan. 2) Banyaknya studi kasus tentang ancaman keamanan maritim di kawasan ini merujuk pada

				<p>menawarkan pendekatan untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi kesulitan di kawasan.</p> <p>3) Memberikan pendalaman terhadap pemahaman mengenai Samudera Hindia</p> <p>4) Memberikan pemahaman tentang <i>Ocean Governance</i></p>	<p>adanya kerjasama regional antara negara-negara Samudera Hindia</p> <p>3) Menyajikan pendekatan interdisiplin untuk menganalisa faktor istoris, hukum laut internasional, ilmu politik, bahkan hubungan internasional yang perlu dipahami dalam meninjau Samudera Hindia.</p> <p>4) Memberikan definisi, onjektif, prinsip, dan indikator atas konsep <i>ocean governance</i>.</p>
2.	<p>Research Agendas for the Indian Ocean Region</p> <p>– Journal of the Indian Ocean Region Vol. 6 – 2010 / Issue 1 Routledge</p>	Christian Bouard, <i>et all.</i>	Kualitatif	<p>Menganalisa kemungkinan menciptakan keamanan kawasan dengan melihat peluang melibatkan kekuatan lain di luar kawasan.</p>	<p>IOR-ARC (bentuk lama dari IORA) relative lemah sekarang dan di masa mendatang kecuali ada upaya untuk melibatkan Cina dalam rezim kemaritiman baru.</p>

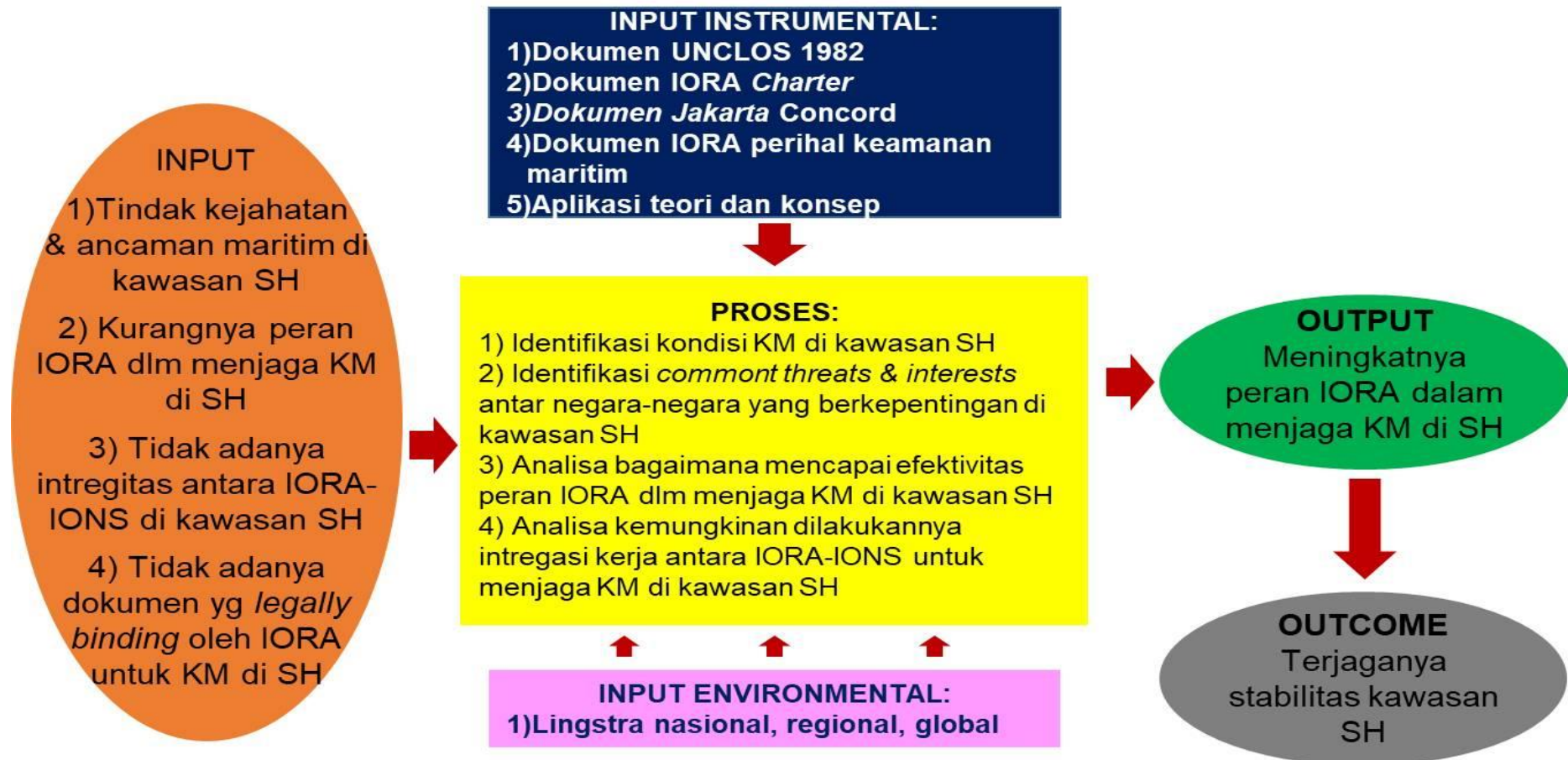
3.	<p>Indian Ocean Rising: Maritime Security and Policy Challenges</p> <p>– Stimson, 2012</p>	<p>David Michel, Russell Sticklor</p>	<p>Kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menganalisa tantangan dan peluang kebijakan di kawasan Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan sebagai arena geopolitik abad 21; 2) Menganalisa peran yang muncul dari tren militer, perdagangan, lingkungan, dan teknologi yang dimainkan aktor-aktor global di wilayah Samudera Hindia; dan 3) Menganalisa potensi kekuatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya alam, dan perubahan iklim yang akan terjadi dan berdampak pada masyarakat pesisir pantai Hindia di masa mendatang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bergesernya <i>center of gravity</i> dari kawasan Eropa menuju Asia menjadikan Samudera Hindia sebagai kawasan dengan nilai geopolitik yang tinggi. Disamping banyak pihak memiliki kepentingan di kawasan ini, banyak juga bermunculan ancaman terhadap keamanan maritim yang secara signifikan mengganggu stabilitas kawasan. 2) Ancaman keamanan maritim yang terjadi di kawasan Samudera Hindia mengundang negara-negara besar dan organisasi regional untuk turut berperan dalam menjaga keamanan kawasan sesuai dengan kepentingan masing-masing. 3) Kawasan Samudera Hindia yang kaya akan minyak, gas, mineral lainnya, dan perikanan menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara di sekitarnya maupun dari luar.
----	--	---	-------------------	---	---

					Sebagai samudea terluas ketiga di dunia, masalah perubahan iklim juga menjadi penting untuk ditinjau di wilayah ini karena berpengaruh pada meningkatnya ketinggian air laut, ekosistem sumber daya maritim, dan berpengaruh pada aktivitas pelayaran dunia.
4.	Securing the Indian Ocean? Competing Regional Security Constructions – Journal of the Indian Ocean Region Vol. 8 – 2012 / Issue 1 Rouledge	Dennis Rumley, <i>et all.</i>	Kualitatif	Mengidentifikasi Samudera Hindia secara tradisional sebagai samudera yang terbengkalai dan menjadi pusat kekuatan dan konflik global.	Membahas enam kajian untuk pengembangan kebijakan di kawasan Samudera Hindia dan merujuk pada kekuatan regional sebagai platform dalam menjaga stabilitas kawasan.

5.	Power, Politics, and Maritime Governance in the Indian Ocean – Journal of the Indian Ocean Region Vol. 9 – 2013 / Issue 1 Routledge	Jivanta Schotti, <i>et all.</i>	Kualitatif	Mengeksplorasi dan mengidentifikasi manideftasi empiris tata kelola maritim di Samudera Hindia	Dibutuhkan pengaturan keamanan yang terpadu dan berskala besar dalam tata kelola Samudera Hindia
----	---	------------------------------------	------------	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur diagram yang menjelaskan tentang garis besar proses penelitian. Dimana kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research questions*) dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Kerangka penelitian ini menjabarkan tentang bagaimana untuk meningkatkan peran IORA dalam menjaga keamanan maritim kawasan Samudera Hindia, dan digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran (Pola Pikir) Penelitian (Diolah dari Latar Belakang dan Rumusan Masalah). Sumber: Peneliti